Pelatihan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jambi

Usna Aning Yulianti.,S.Si.

Kementerian Dalam Negeri

DASAR HUKUM

Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kementerian Dalam Negeri merupakan koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan umum:

pembagian urusan pemerintahan	kelembagaan daerah	kepegawaian pada Perangkat Daerah	keuangan daerah	Pembangun-an daerah	pelayanan publik di daerah	kerja sama daerah	kebijakan daerah;	kepala daerah dan DPRD	Lainnya

Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.

IPKD

Permendagri No.19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN PENGUKURAN IPKD

Pasal 2 Permendagri No. 19 Tahun 2020

Memperoleh gambaran (peta) pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Provinsi dan Kab/Kota

1. mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
4. memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik;
5. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

DIMENSI DAN INDIKATOR INDEKS PKD

1. KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1) Kesesuaian program RPJMD & RKPD
2) Kesesuaian program RKPD & KUA-PPAS
3) Kesesuaian Program KUA-PPAS & APBD
4) Kesesuaian Pagu RKPD & KUA-PPAS
5) Kesesuaian Pagu KUA-PPAS & APBD

2. PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DALAM APBD

1. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD
2. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD
3. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% dari DTU
4. Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perundang-undangan

3. TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH

1) Ketepatan waktu pengungkapan
2) Keteraksesan

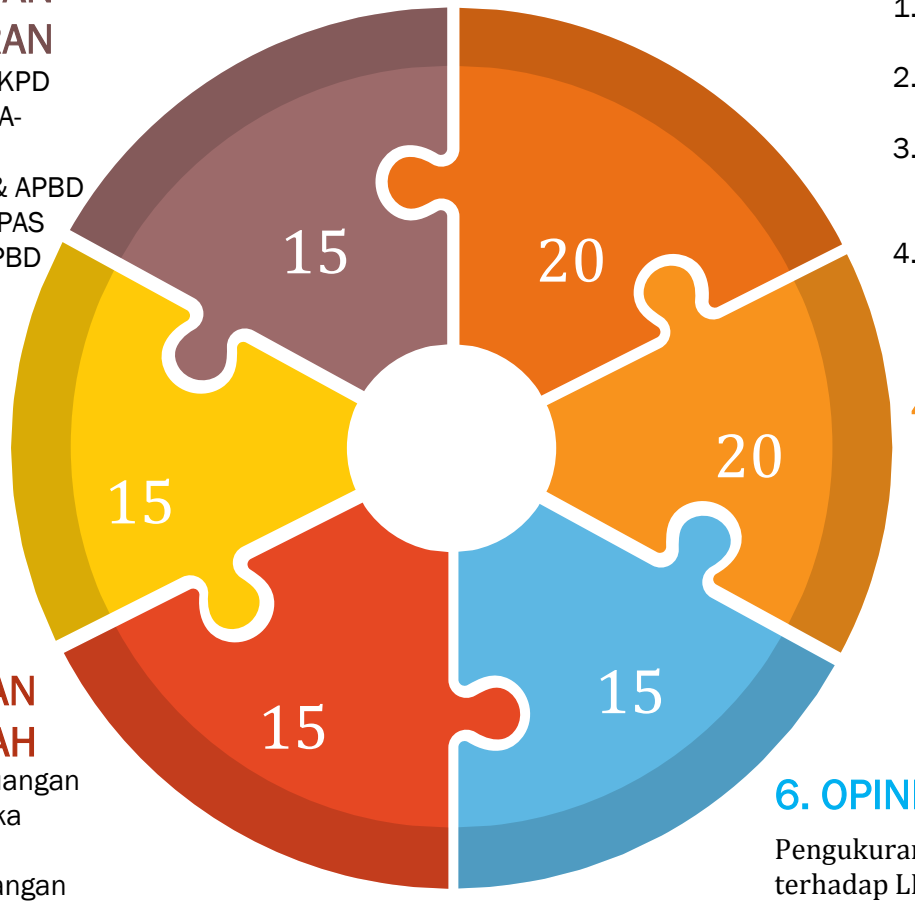

4. PENYERAPAN ANGGARAN

1) Belanja Transfer daerah
2) Belanja Operasional
3) Belanja Modal
4) Belanja tak terduga

5. KONDISI KEUANGAN DAERAH

1. Kemandirian keuangan
2. Solvabilitas jangka panjang
3. Fleksibilitas keuangan
4. Solvabilitas layanan
5. Solvabilitas Operasional
6. Solvabilitas jangka pendek

6. OPINI BPK ATAS LKPD

Pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut.

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUMBER DATA IPKD

PROVINSI

- Bappeda Provinsi terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
- Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait KUA-PPAS, APBD, dan LKPD
- Dinas Kominfo Provinsi sebagai pengelola website Pemda, terkait transparansi dokumen pengelolaan keuandan daerah
- Inspektorat Daerah Provinsi terkait Opini BPK atas LKPD

KABUPATEN/KOTA

- Bappeda Kab/Kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
- Badan Pengelola Keuangan Kab/Kota terkait KUA-PPAS, APBD, dan LKPD
- Dinas Kominfo Kab/Kota sebagai pengelola website Pemda, terkait transparansi dokumen pengelolaan keuandan daerah
- Inspektorat Daerah Kab/Kota terkait Opini BPK atas LKPD

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

APLIKASI PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

alamat web: http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

Instansi	Username	Password
Provinsi Jambi	jambi_15	123456
Kabupaten Batanghari	batanghari_1504	123456
Kabupaten Bungo	bungo_1508	123456
Kabupaten Kerinci	kerinci_1501	123456
Kabupaten Merangin	merangin_1502	123456
Kabupaten Muaro Jambi	muarojambi_1505	123456
Kabupaten Sarolangun	sarolangun_1503	123456
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	tanjungjabungbarat_1506	123456
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	tanjungjabungtimur_1507	123456
Kabupaten Tebo	tebo_1509	123456
Kota Jambi	tebo_1509	123456
Kota Sungai Penuh	kotasungaipenuh_1572	123456

Daftar Username dan Password Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Jambi

EVALUASI PENGINPUTAN DATA IPKD
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018

INPUT DATA SESUAI

INPUT DATA TIDAK LENGKAP/TIDAK SESUAI

TIDAK INPUT DATA

No.	PROVINSI	Keterangan					
		Dim. 1	Dim. 2	Dim. 3	Dim. 4	Dim. 5	Dim. 6
1	Provinsi Jambi	-	-	*	V	V	*
2	Kabupaten Batanghari	V	V	*	V	V	V
3	Kabupaten Bungo	V	-	*	V	V	*
4	Kabupaten Kerinci	*	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Merangin	-	V	*	V	V	*
6	Kabupaten Muaro Jambi	*	-	-	-	-	*
7	Kabupaten Sarolangun	*	V	*	V	V	V
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	V	V	*
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V	V	V	V	V	*
10	Kabupaten Tebo	V	V	-	V	V	*
11	Kota Jambi	V	V	*	V	V	*
12	Kota Sungai Penuh	-	V	*	V	V	*

EVALUASI PENGINPUTAN DATA IPKD
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019

INPUT DATA SESUAI

INPUT DATA TIDAK LENGKAP/TIDAK SESUAI

TIDAK INPUT DATA

No.	PROVINSI	Keterangan					
		Dim. 1	Dim. 2	Dim. 3	Dim. 4	Dim. 5	Dim. 6
1	Provinsi Jambi	-	-	*	V	V	*
2	Kabupaten Batanghari	V	V	*	V	V	V
3	Kabupaten Bungo	*	-	*	V	V	*
4	Kabupaten Kerinci	*	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Merangin	-	V	*	V	V	*
6	Kabupaten Muaro Jambi	*	-	-	-	-	*
7	Kabupaten Sarolangun	*	V	*	V	V	V
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	V	V	*
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V	V	V	V	V	*
10	Kabupaten Tebo	V	V	-	V	V	*
11	Kota Jambi	V	V	*	V	V	*
12	Kota Sungai Penuh	-	V	*	V	-	*

EVALUASI PENGINPUTAN DATA IPKD
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020

INPUT DATA SESUAI

INPUT DATA TIDAK LENGKAP/TIDAK SESUAI

TIDAK INPUT DATA

No.	PROVINSI	Keterangan					
		Dim. 1	Dim. 2	Dim. 3	Dim. 4	Dim. 5	Dim. 6
1	Provinsi Jambi	-	-	*	V	V	V
2	Kabupaten Batanghari	V	V	*	V	V	V
3	Kabupaten Bungo	*	-	*	V	V	*
4	Kabupaten Kerinci	*	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Merangin	-	V	*	V	V	V
6	Kabupaten Muaro Jambi	*	-	-	-	-	V
7	Kabupaten Sarolangun	*	V	*	V	V	V
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	V	V	V
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V	V	V	V	V	V
10	Kabupaten Tebo	V	V	-	V	V	V
11	Kota Jambi	V	V	*	V	V	V
12	Kota Sungai Penuh	-	V	*	V	V	V

APLIKASI PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

alamat web: http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

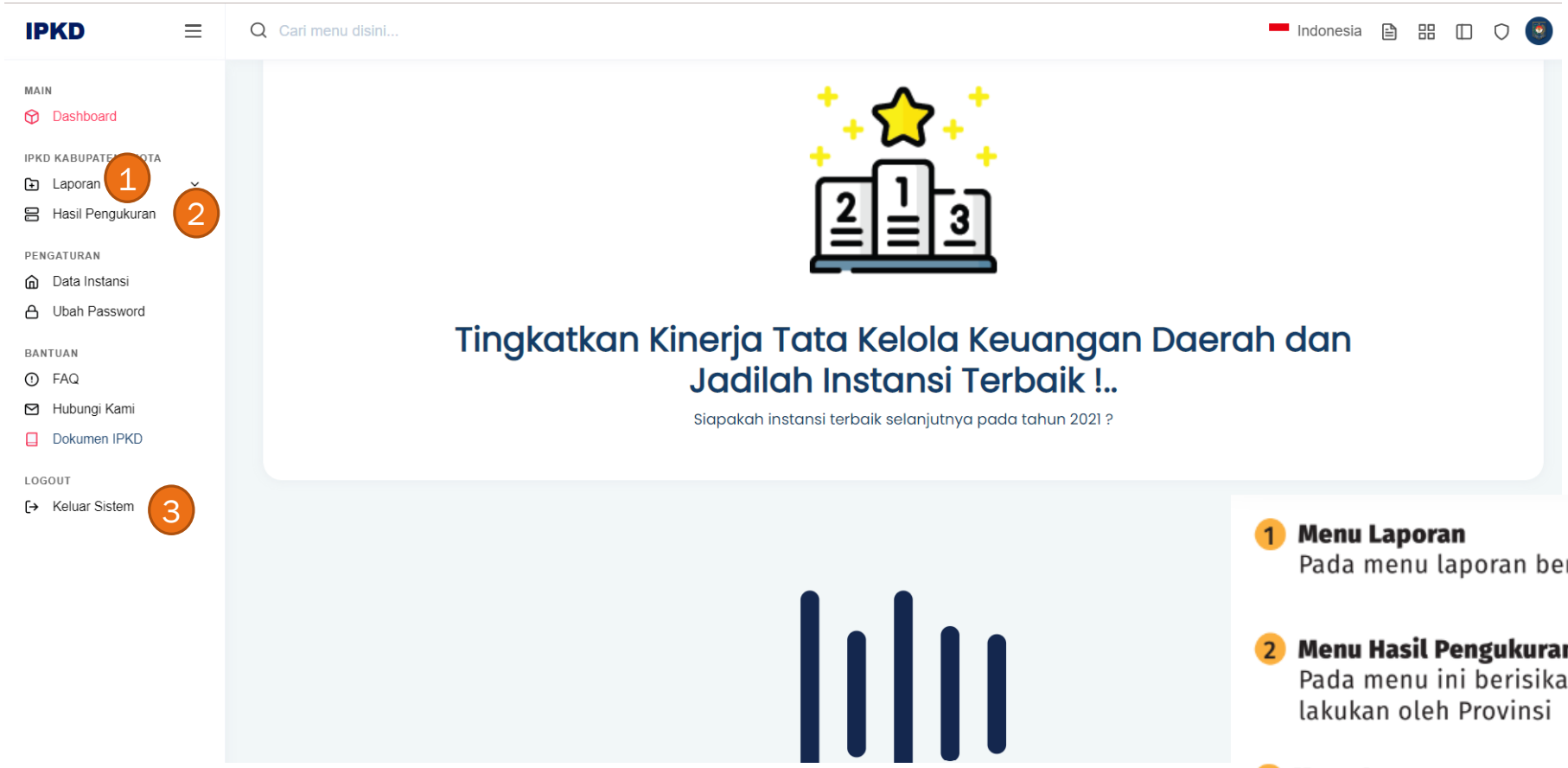

TAMPILAN DASHBOARD APLIKASI

1 **Menu Laporan**
Pada menu laporan berisi sub menu penginputan data 6 Dimensi

2 **Menu Hasil Pengukuran IPKD**
Pada menu ini berisikan data hasil pengukuran IPKD yang telah di lakukan oleh Provinsi

3 **Menu Logout**
Menu ini berfungsi jika Pemda ingin keluar dari Aplikasi IPKD.

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

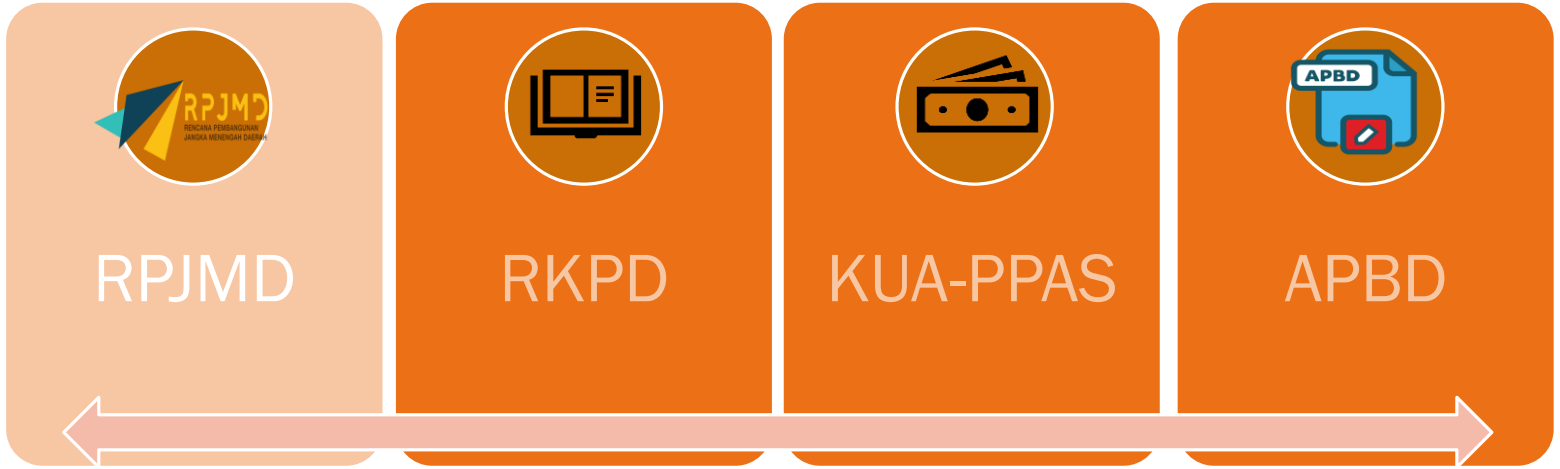

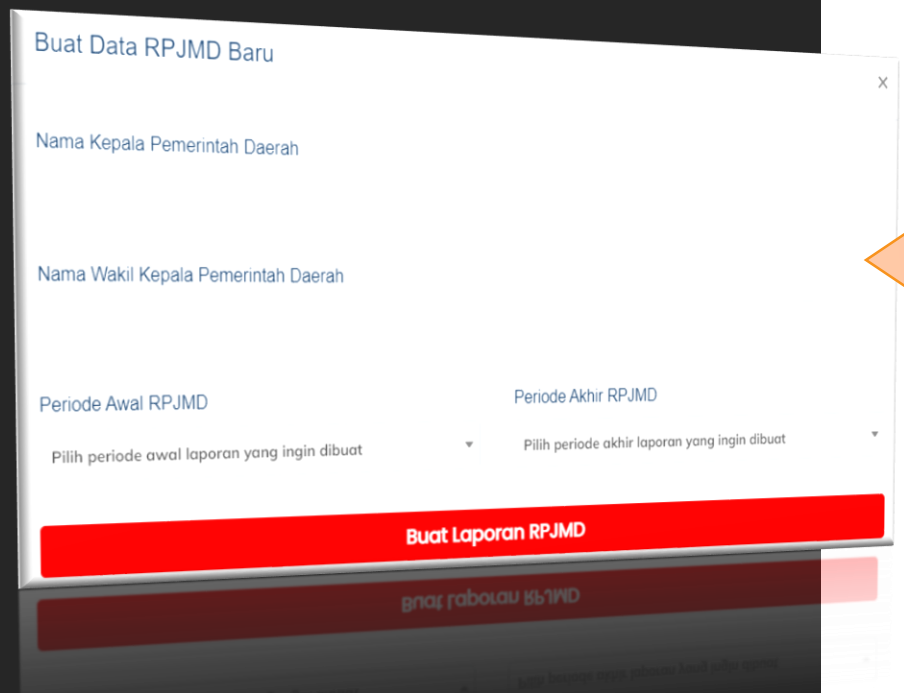

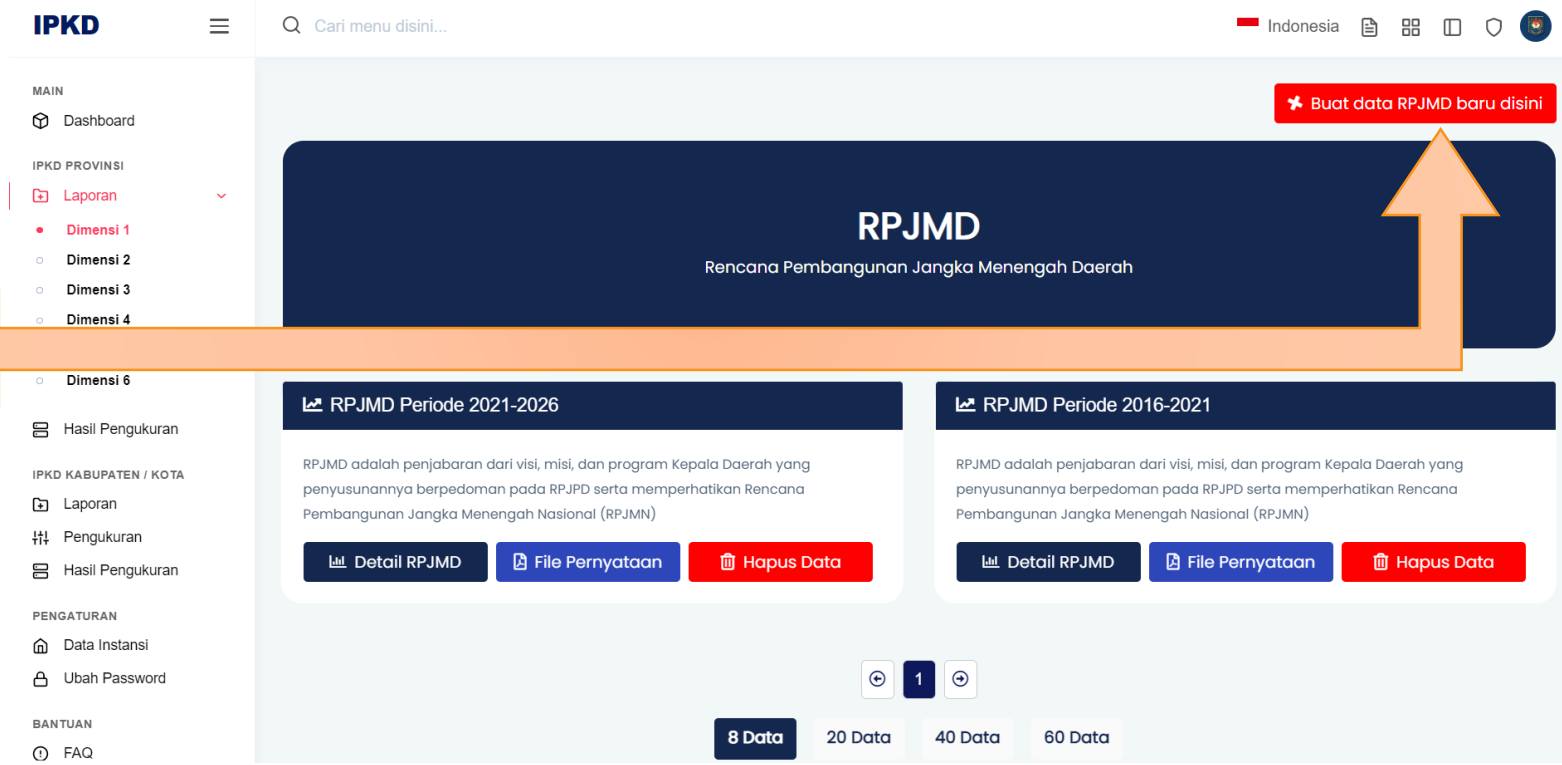

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

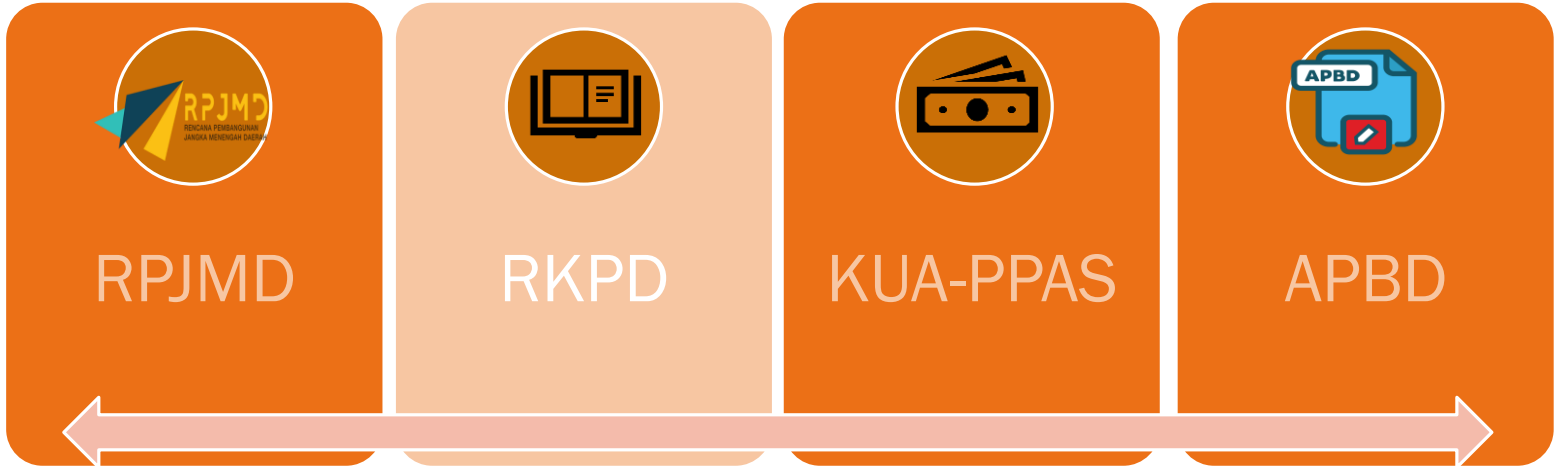

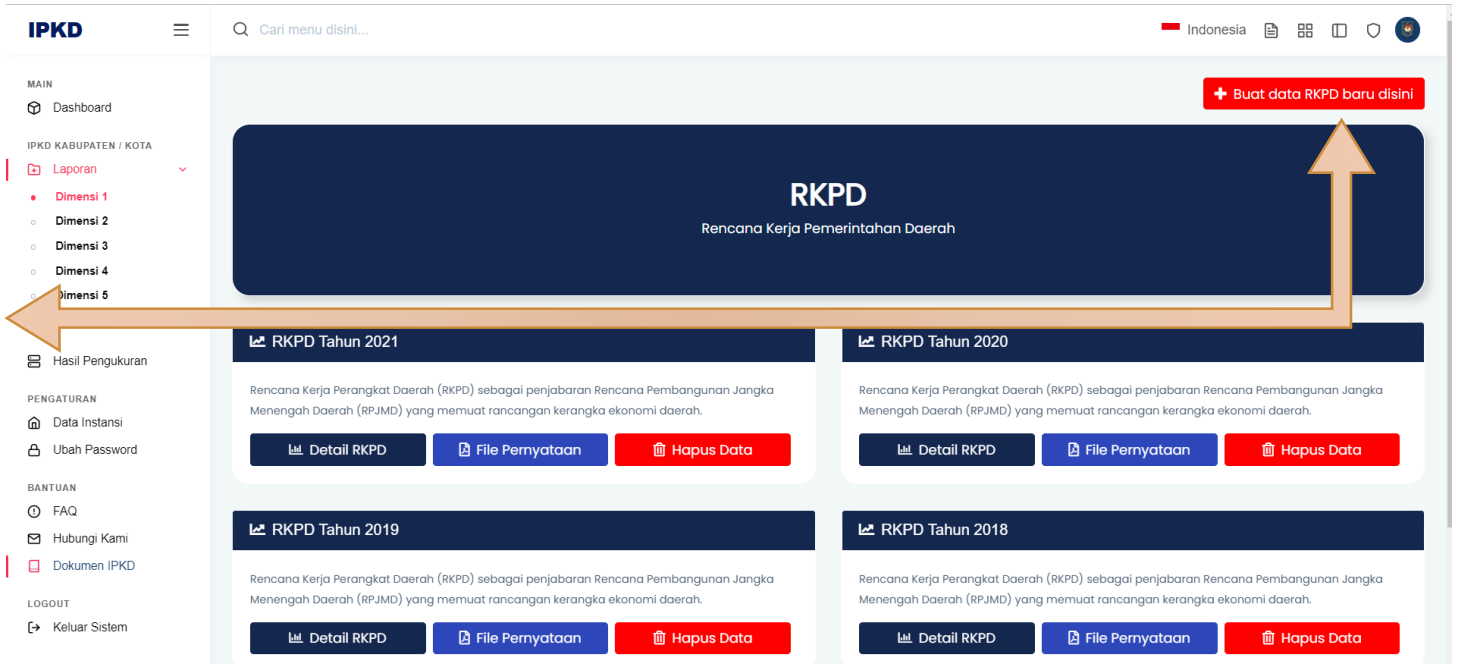

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

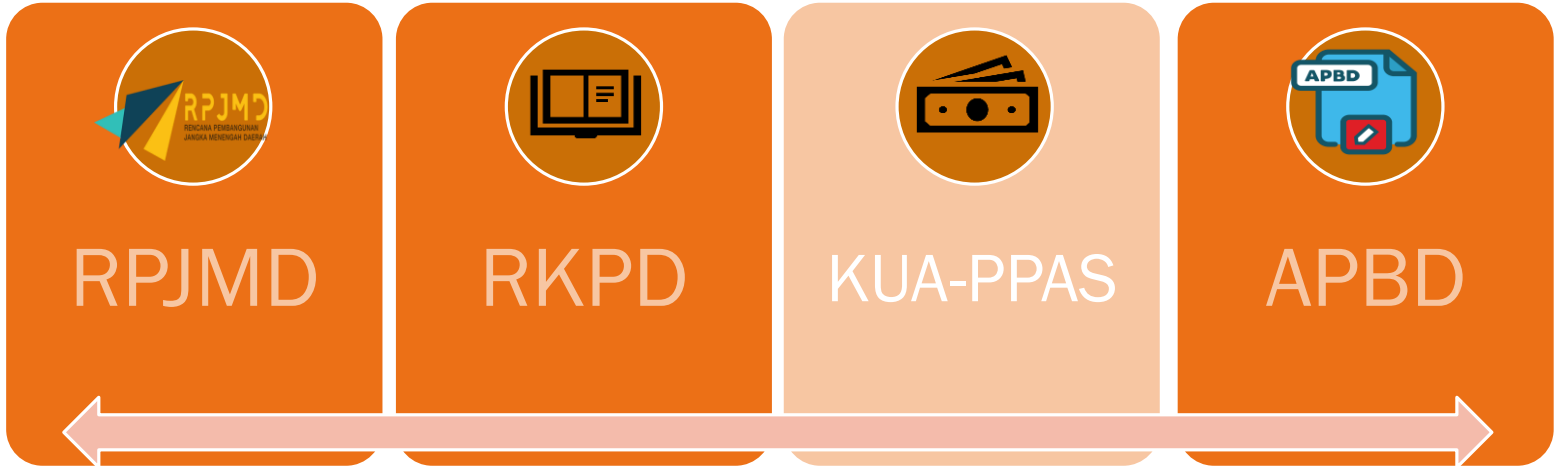

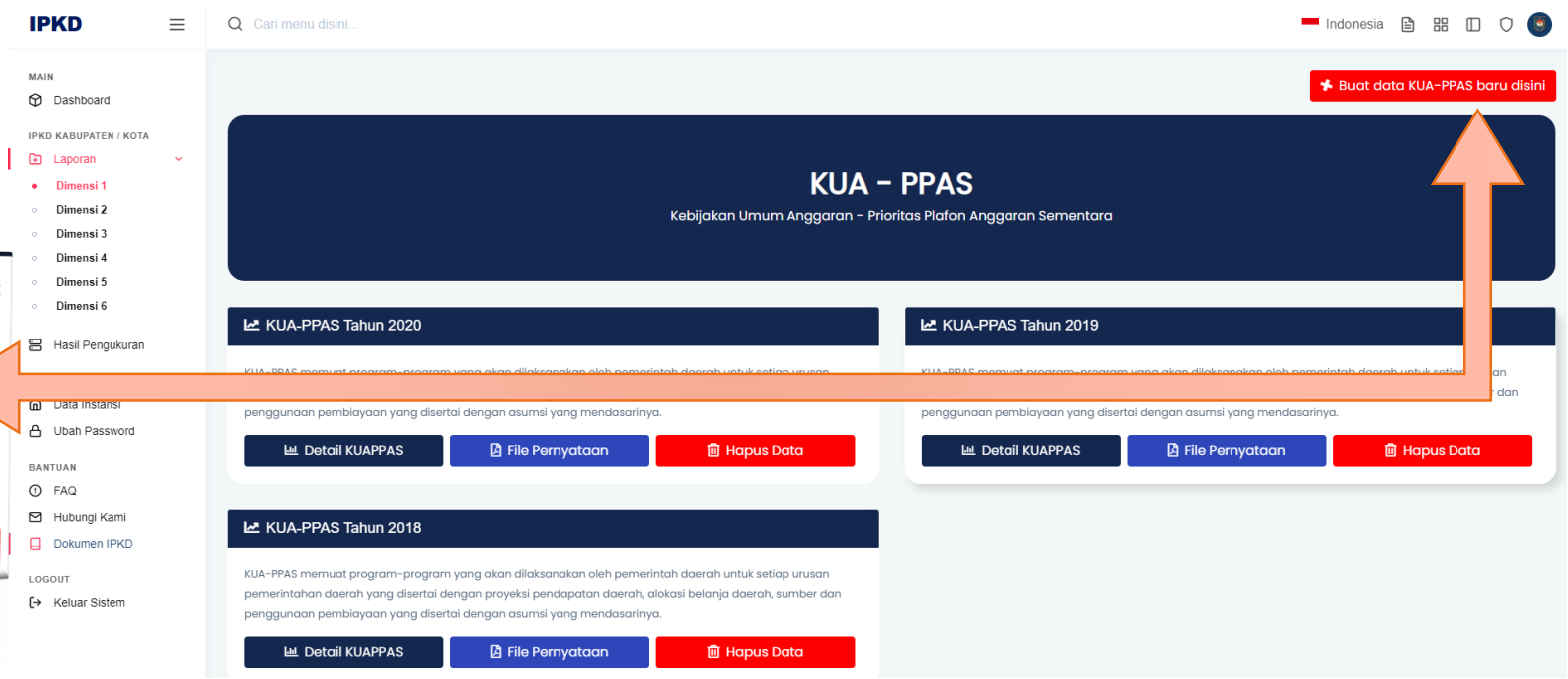

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

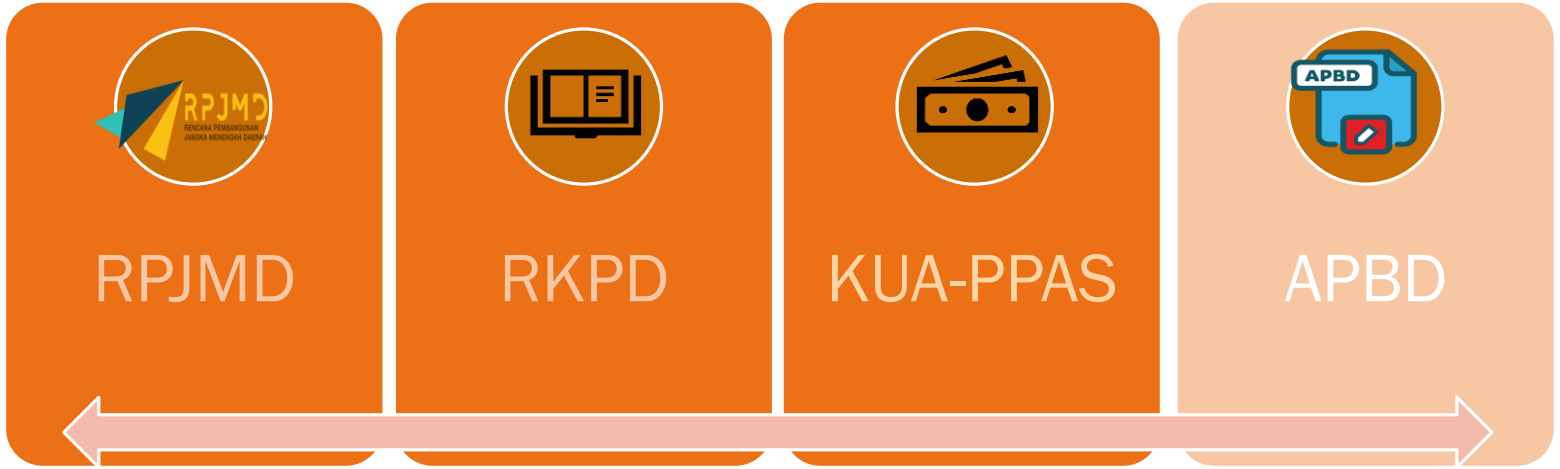

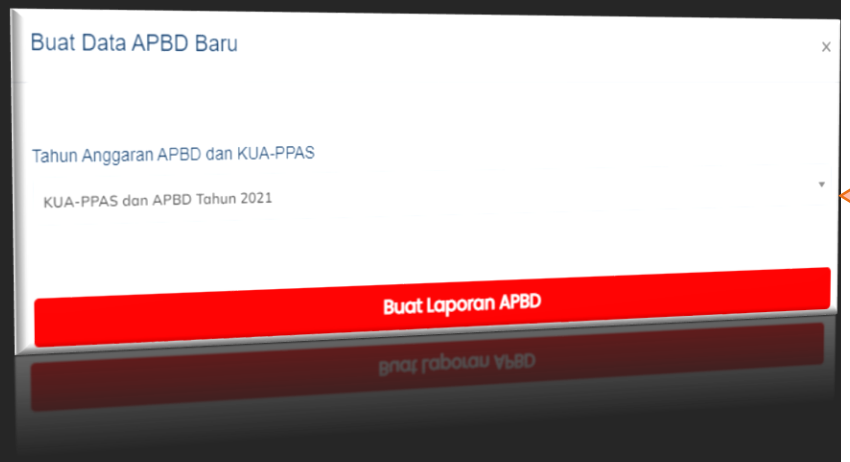

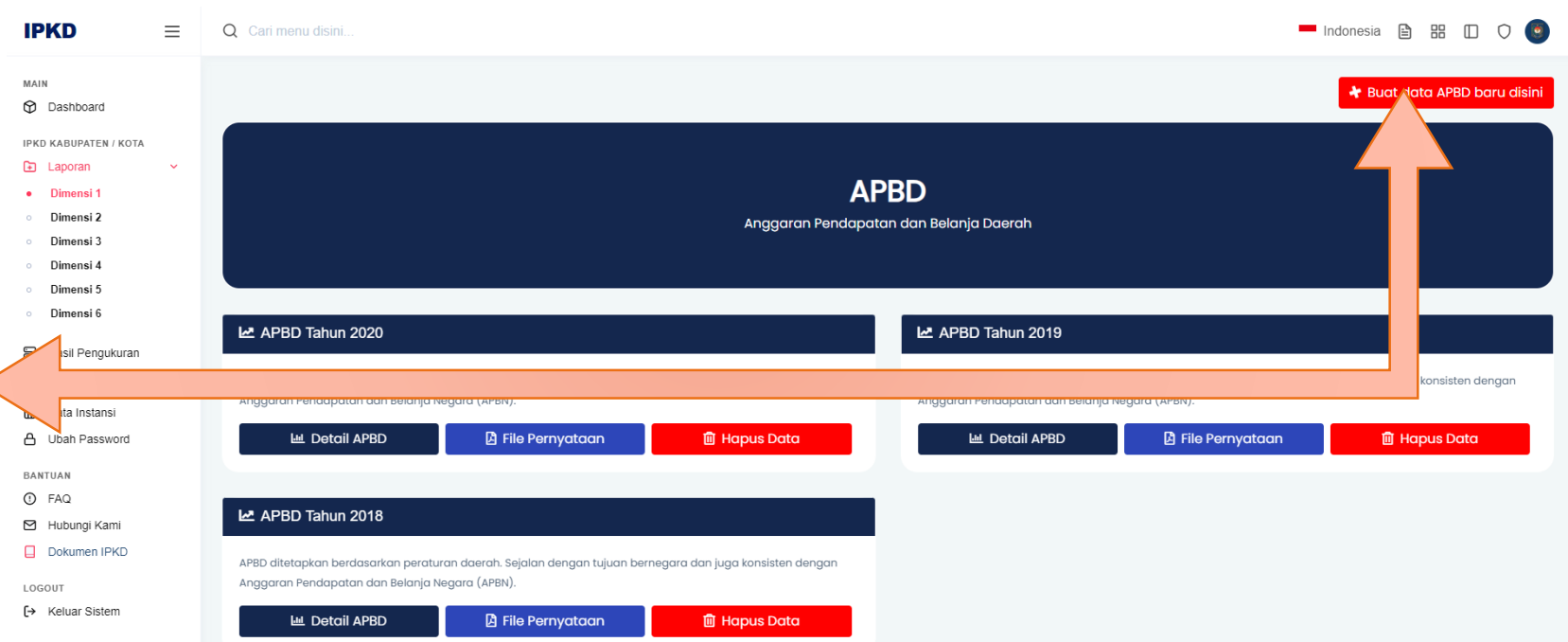

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Cara Mengupload Dokumen

Contoh : Dokumen RKPD (Langkah yang sama untuk dok.KUAPPAS dan APBD

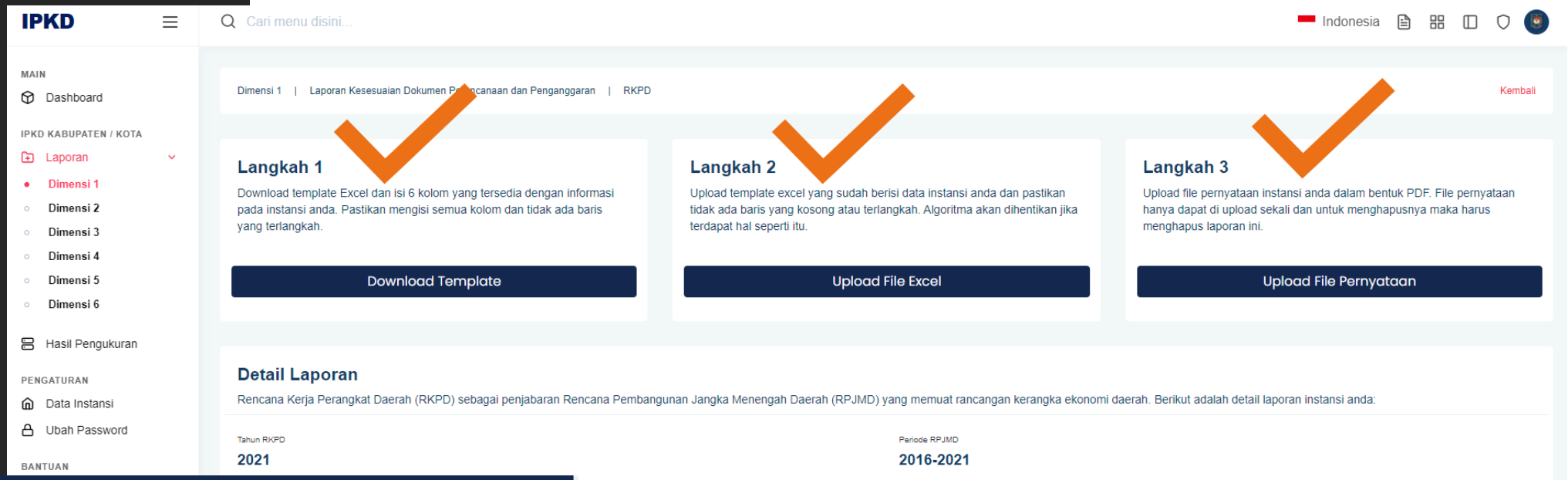

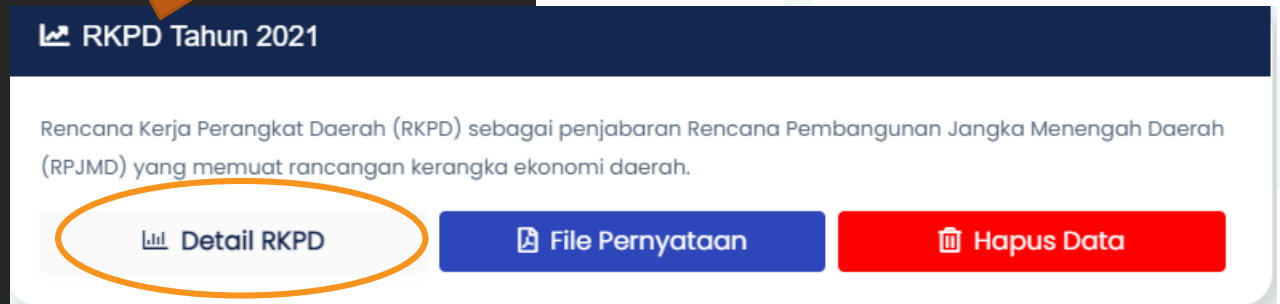

Dimensi-1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Cara Mengupload Dokumen

Contoh : Dokumen RKPD yang berhasil diupload maka akan muncul table sebagai berikut

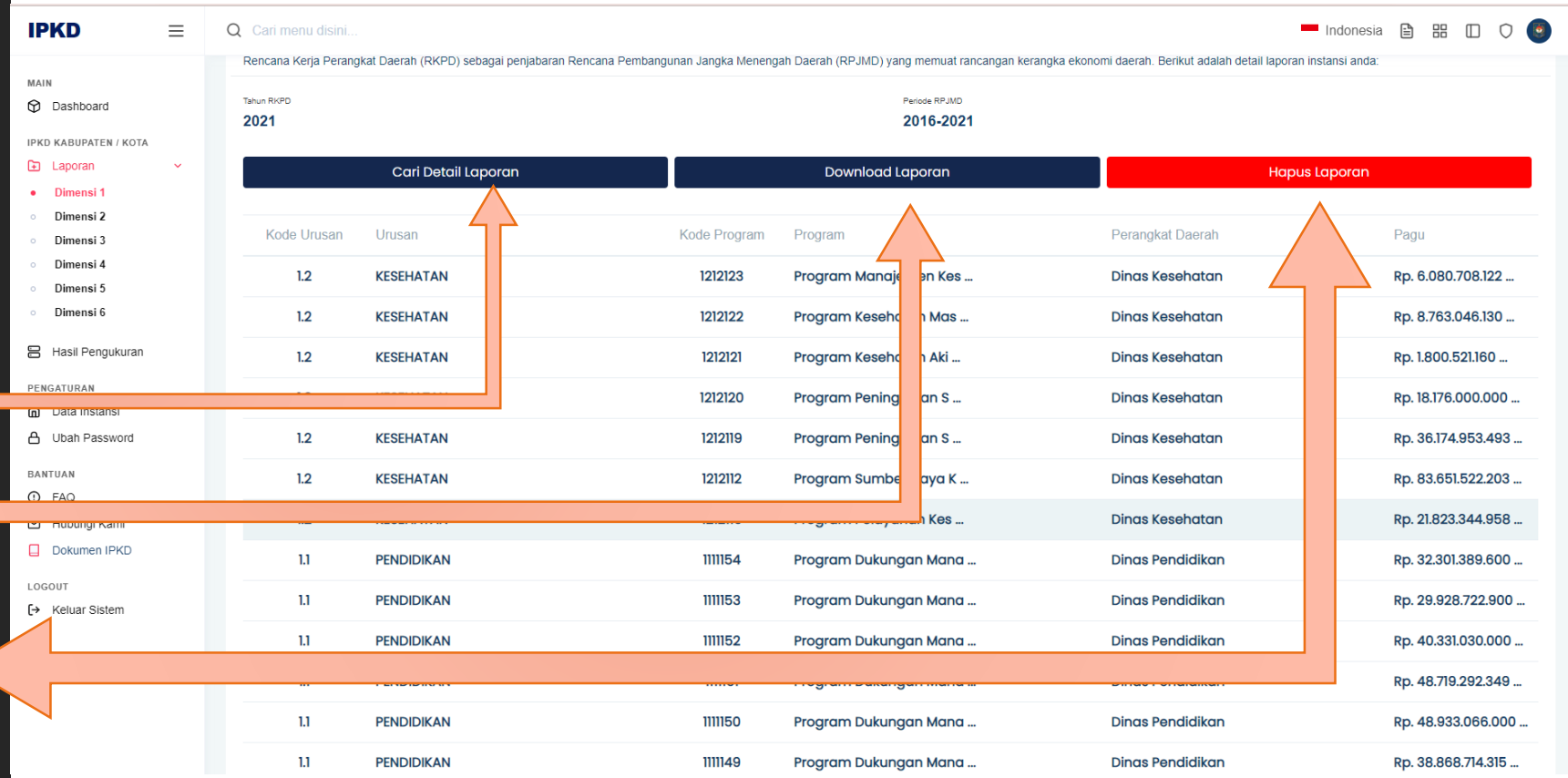

Untuk mencari detil laporan

Untuk mendownload laporan

Untuk menghapus laporan

Dimensi-2 Alokasi Belanja dalam APBD

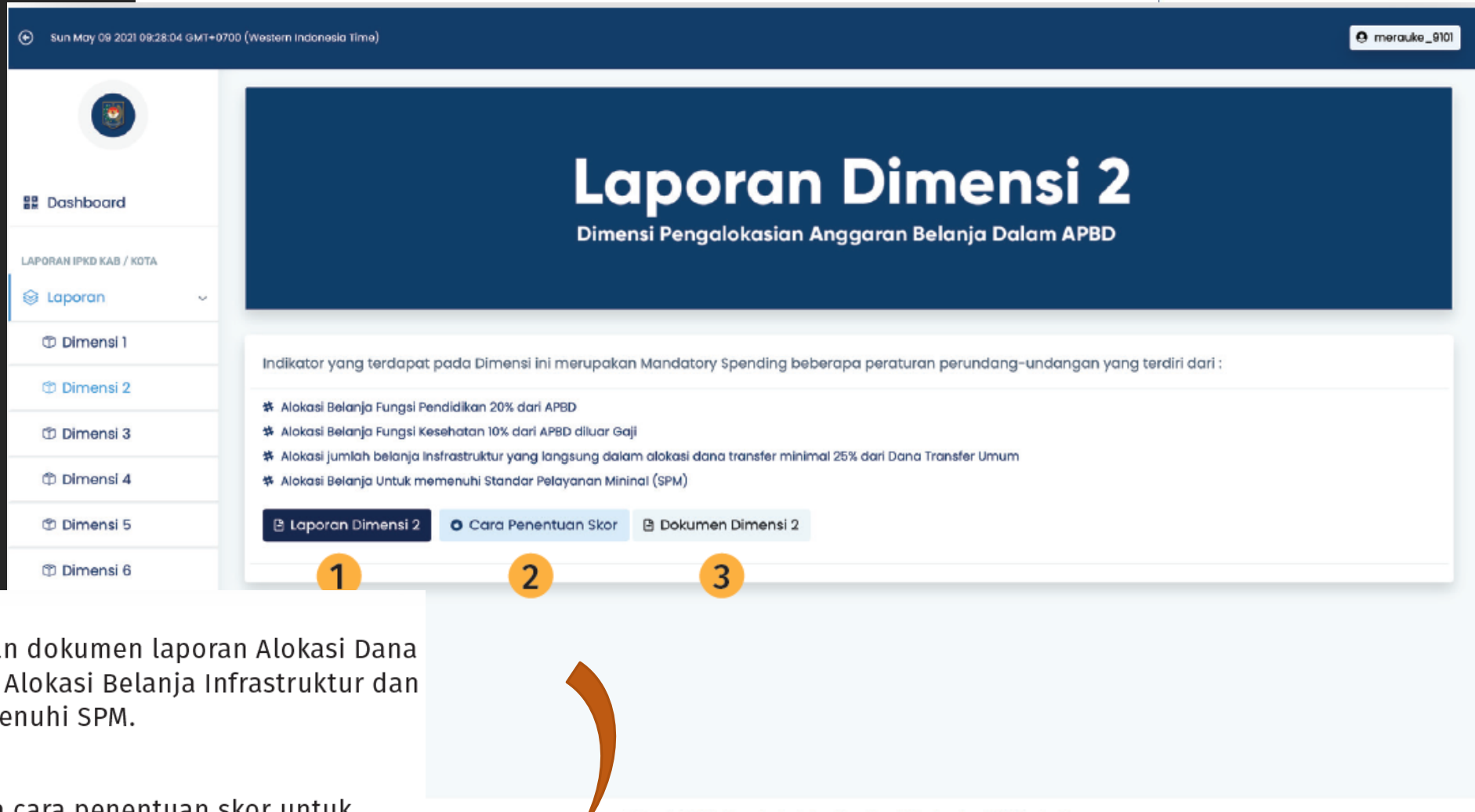

1. **Menu Laporan Dimensi 2**
   halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen laporan Alokasi Dana Pendidikan, Alokasi Dana Kesehatan, Alokasi Belanja Infrastruktur dan Indikator Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM.

2. **Menu Cara Penentuan Skor**
   halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk Dimensi 2

3. **Menu Dokumen Dimensi 2**
   halaman ini berisi dokumen petujuk teknis

IPKD INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-2 Alokasi Belanja dalam APBD

- Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD
- Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD
- Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur min 25%
- 1.Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perundang-undangan

SUMBER DATA : PERUBAHAN APBD

Cara Mengupload Dokumen

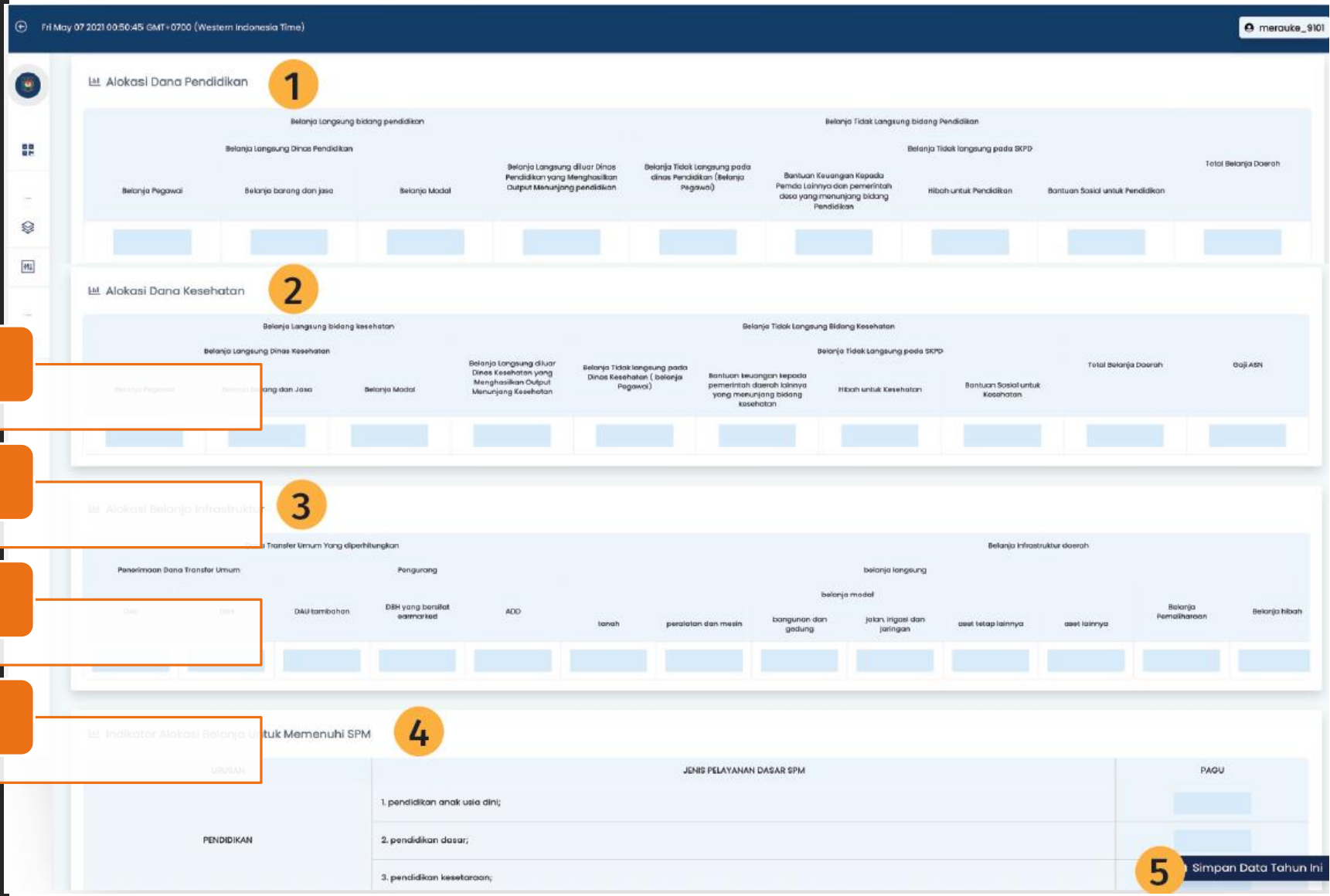

IPKD INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD
8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD
10	Informasi DPA PPKD
11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah
12	Informasi Realisasi Belanja Daerah
13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah
14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
15	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
16	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD
18	Informasi Rencana Umum Pengadaan
19	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
21	Informasi Laporan Arus Kas
22	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD
24	Informasi Neraca
25	Informasi CaLK Pemerintah Daerah
26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
27	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
28	Informasi Penetapan Perda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD
29	Informasi Opini BPK RI

KETEPATAN WAKTU : TGL UNGGAH – TGL PENETAPAN ≤ 30 HARI

KETERAKSESAN : LINK/URL WEB PEMDA DAPAT DIAKSES TANPA VERIFIKASI (PASSWORD, USERNAME, DLL)

Keterangan : Diskominfo berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD dalam mengunggah 29 dokumen ke dalam website pemda

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Cara Mengupload Dokumen

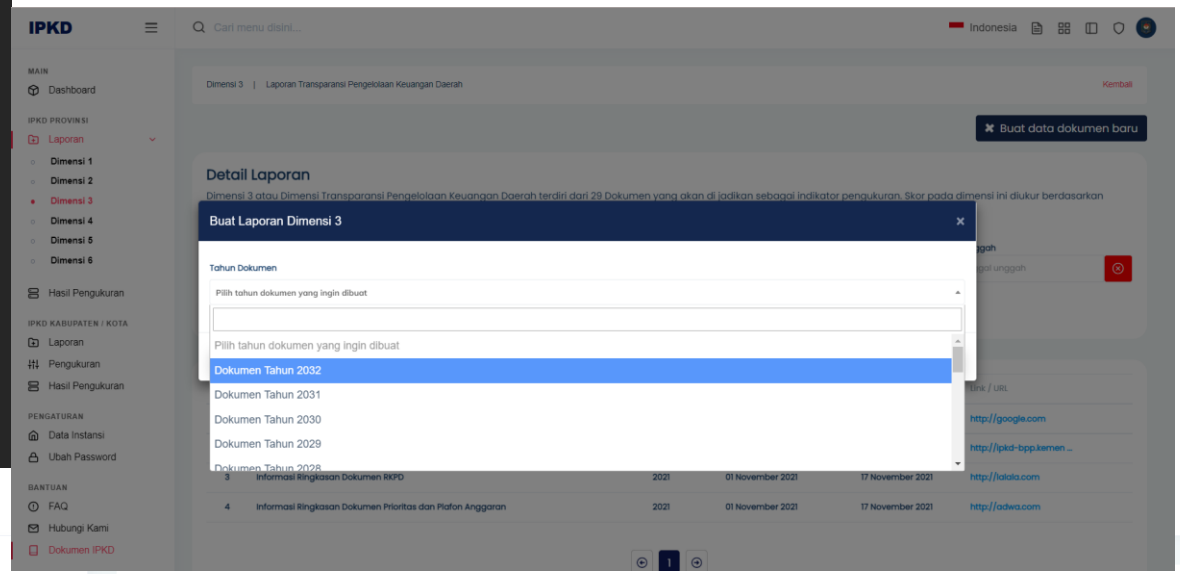

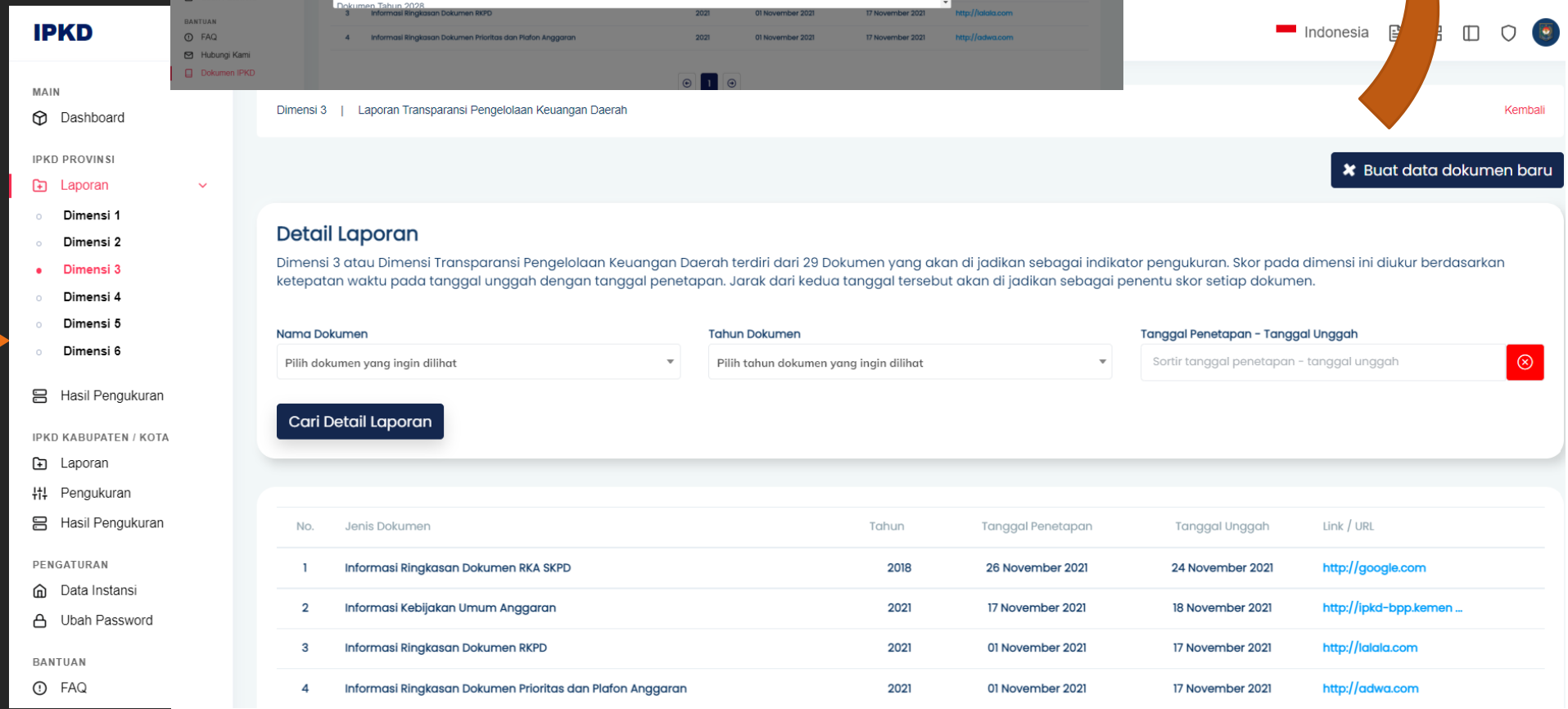

Dimensi-3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

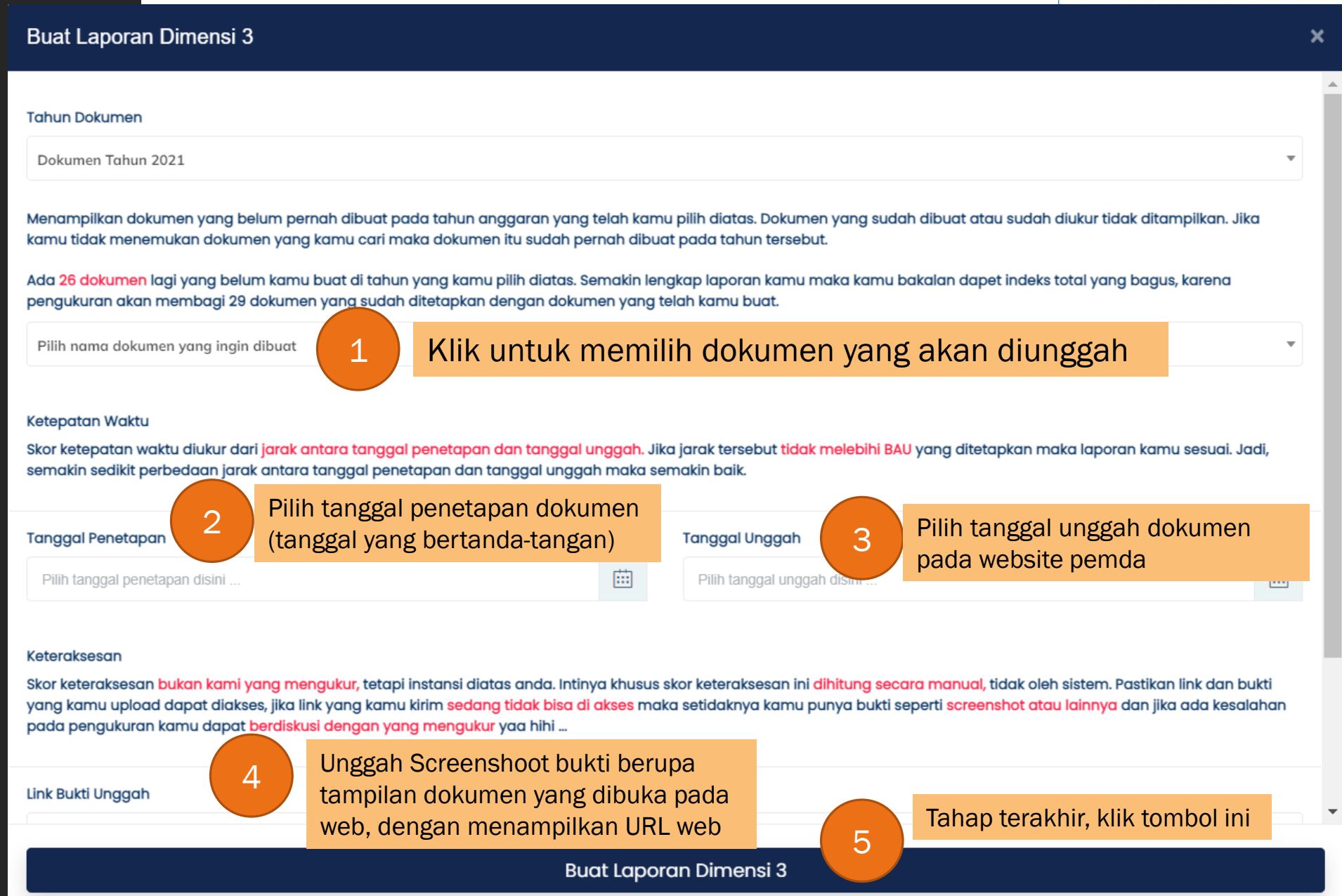

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-4 Penyerapan Anggaran

SUMBER DATA :
LRA pada LKPD

- Penyerapan Anggaran Belanja Operasional ≥ 80%
- Penyerapan Anggaran Belanja Modal ≥ 80%
- Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga ≥ 80%
- 1.Penyerapan Anggaran Belanja Transfer ≥ 80%

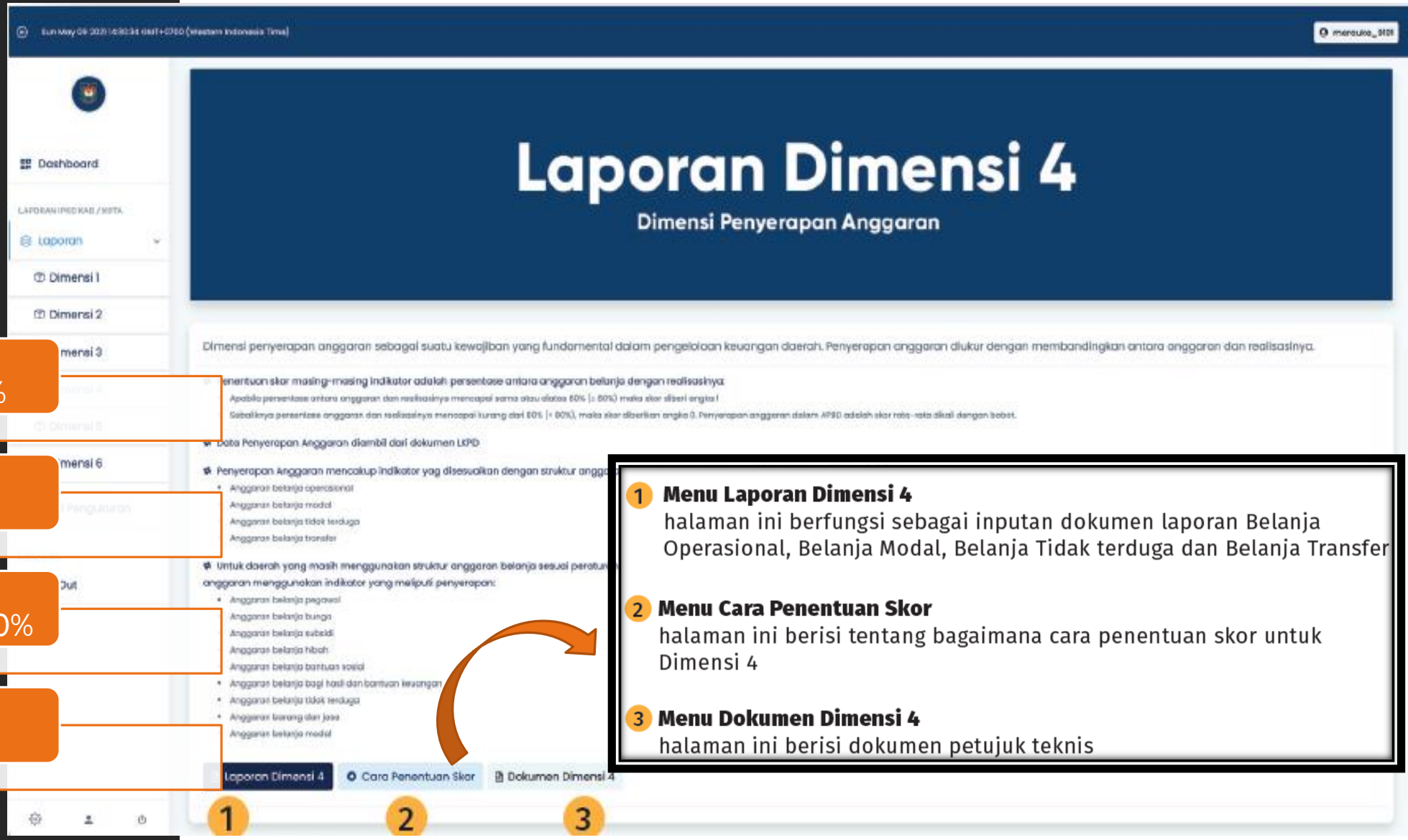

1 **Menu Laporan Dimensi 4**
halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen laporan Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer

2 **Menu Cara Penentuan Skor**
halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk Dimensi 4

3 **Menu Dokumen Dimensi 4**
halaman ini berisi dokumen petujuk teknis

IPKD INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi-4 Penyerapan Anggaran

SUMBER DATA : LRA pada LKPD

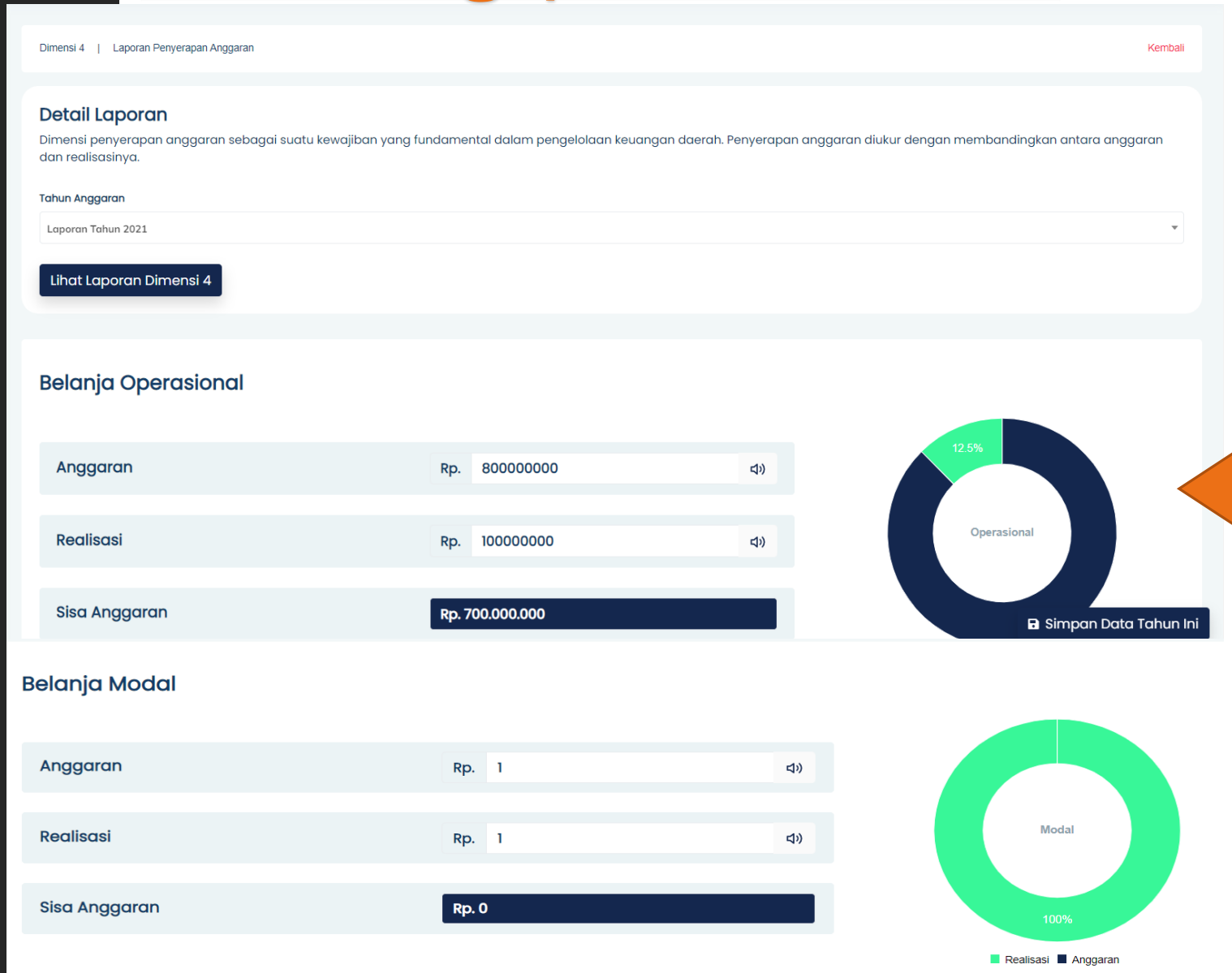

Ketik Anggaran dan Realisasi utk Belanja Operasional dan Belanja Modal, sesuai pada dok.LRA

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Cara Mengupload Dokumen

Dimensi-4 Penyerapan Anggaran

SUMBER DATA : LRA pada LKPD

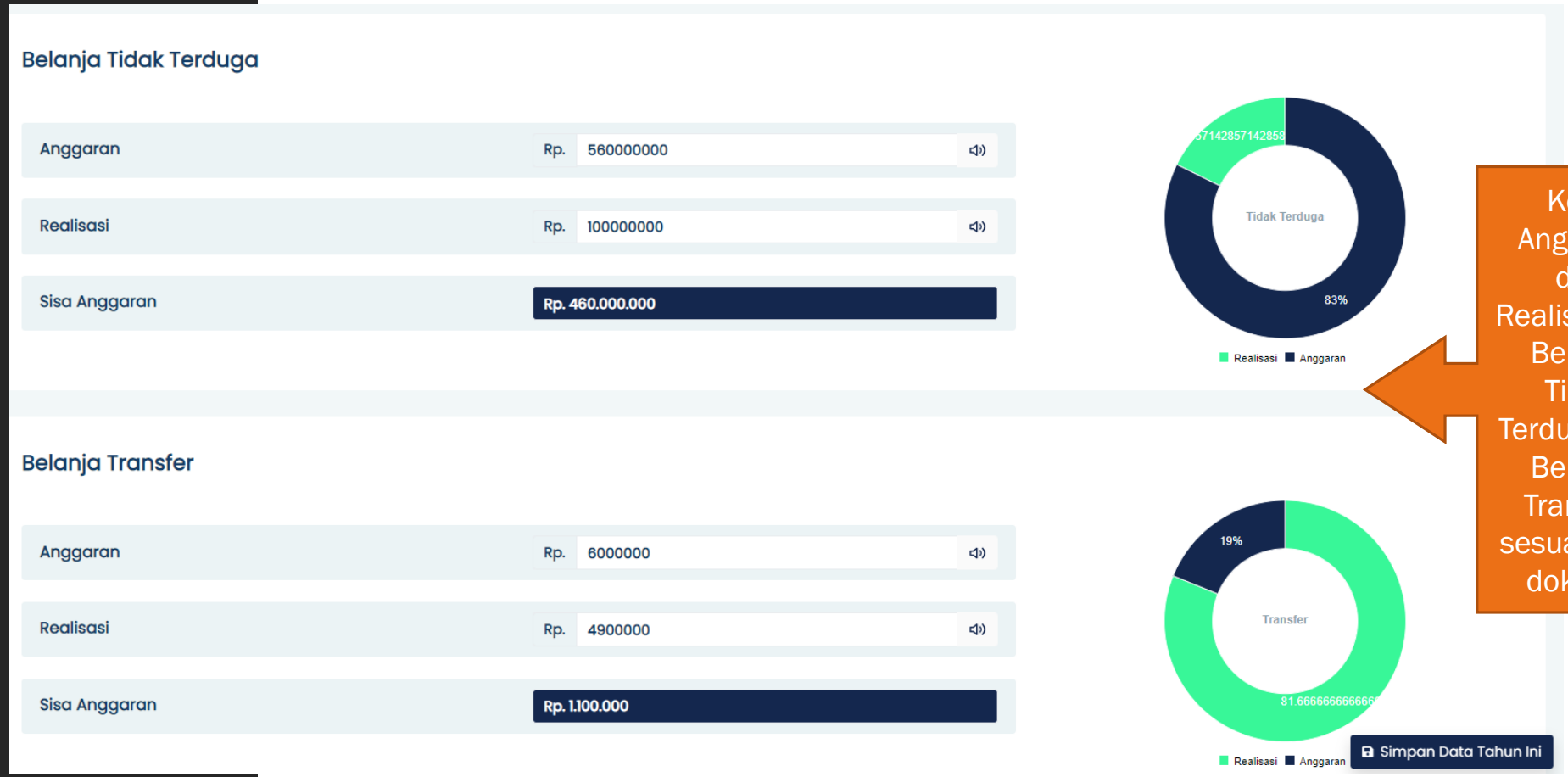

Ketik Anggaran dan Realisasi utk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, sesuai pada dok.LRA

IPKD INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

SUMBER DATA :
LO, Neraca, dan LRA pada LKPD

KETERANGAN:
Wajib diisi, perhatikan digit angka, jangan sampai salah ketik

Formula Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

No	Indikator	Definisi	Formula
1.	Kemandirian Keuangan	Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{total pendapatan}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
2.	Fleksibilitas Keuangan	Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity).	$\frac{\text{(total pendapatan – DAK)}}{\text{(total kewajiban + belanja pegawai)}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
3.	Solvabilitas Operasional	Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.	$\frac{\text{Total pendapatan LO – pendapatan DAK LO)}}{\text{total beban LO.}}$

IPKD INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

SUMBER DATA : LO, Neraca, dan LRA pada LKPD

Formula Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

No	Indikator	Definisi	Formula
4.	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.	$\frac{\text{(Kas dan setara kas + Investasi Jk. Pendek)}}{\text{Kewajiban Lancar}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
5.	Solvabilitas Jangka Panjang	Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{kewajiban jangka panjang}}$

No	Indikator	Definisi	Formula
6.	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.	$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{jumlah penduduk}}$

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

Cara Mengupload Dokumen

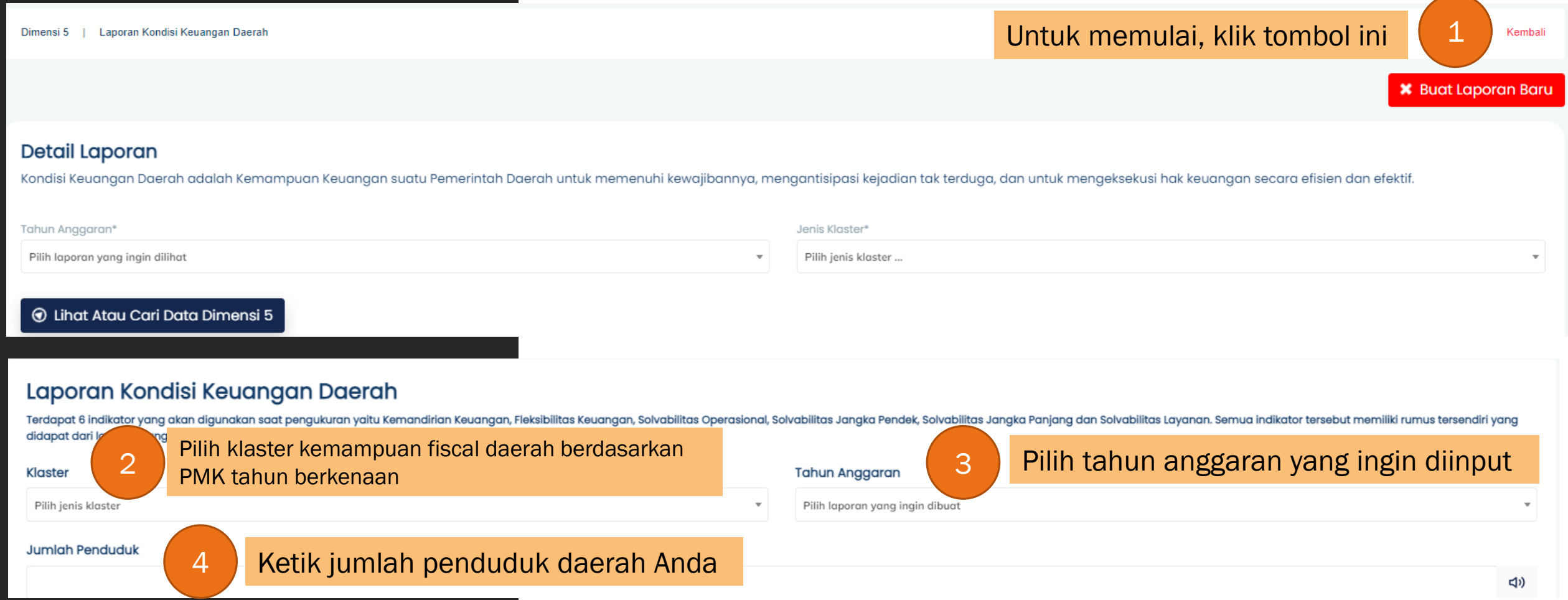

IPKD INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-5 Kondisi Keuangan Daerah

Cara Mengupload Dokumen

5

LRA

Total PAD	Rp.
Total Pendapatan	Rp.
Pendapatan DAK	Rp.
Belanja Pegawai	Rp.

6

Neraca

Total Kewajiban	Rp.
Kas dan Setara Kas	Rp.
Investasi Jangka Pendek	Rp.
Kewajiban Lancar	Rp.
Total Asset Tetap	Rp.
Kewajiban Jangka Panjang	Rp.

7

LO

Total Pendapatan	Rp.
DAK	Rp.
Total Beban Operasional	Rp.

File lampiran ini opsional. Bisa berisi catatan, rekapan atau informasi lebih detail lainnya. Sebelum kamu membuatnya sendiri lebih baik bertanya dengan instansi yang mengukur mengenai file lampiran ini. Siapa tau mereka punya kebijakannya tersendiri.

8

Upload satu atau lebih file lampirannya disini !...

Laporan ini masih bisa kamu ubah atau kamu hapus selama belum dilakukannya pengukuran. Kalo udah diukur laporannya udah gak ada lagi disini pastinya ada di menu hasil pengukuran dan kamu udah gak bisa mengubah atau menghapusnya.

9

Buat Laporan Ini

IPKD
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dimensi-6 Opini BPK atas LKPD

Cara Mengupload Dokumen

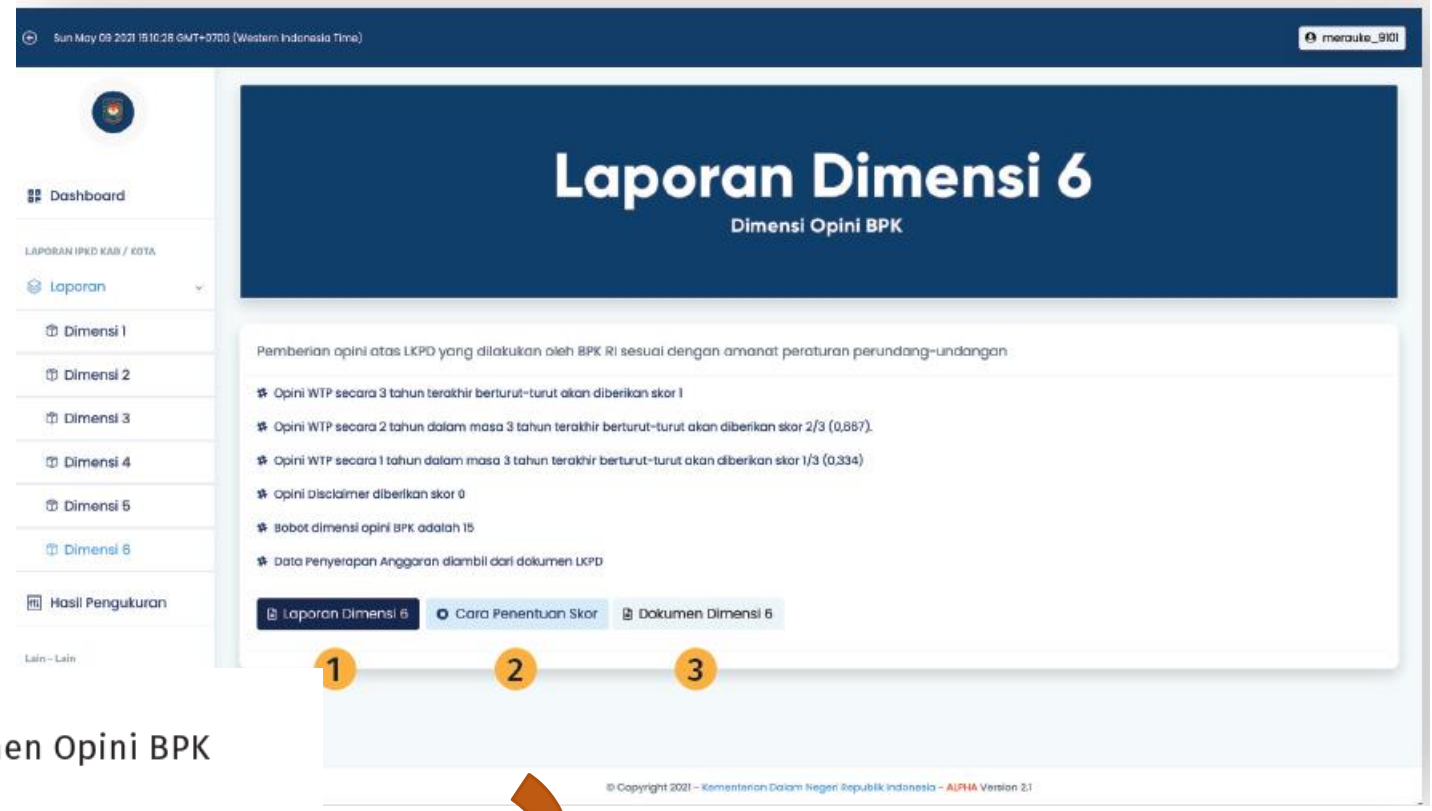

1. **Menu Laporan Dimensi 6**
   halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen Opini BPK

2. **Menu Cara Penentuan Skor**
   halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk Dimensi 6

3. **Menu Dokumen Dimensi 6**
   halaman ini berisi dokumen petujuk teknis

Dimensi-6 Opini BPK atas LKPD

Cara Mengupload Dokumen

1. Klik tombol
2. Pilih TA berkenaan
3. Browse file Bukti WTP
4. Ketik Keterangan
5. Klik untuk membuat laporan

KET : HANYA LAPORAN WTP YANG DIUNGGAH

Terima Kasih